



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT DAERAH
SUB UNIT KERJA : RSUD BAGAS WARAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LIMAWAN BUDIWIBOWO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 208858

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m²/100 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 212 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 497.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
6. MOBIL, BMW 318 I Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 265.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 502.232.170**F. HARTA LAINNYA** Rp. 36.053.983

Sub Total Rp. 3.200.286.153



III. HUTANG

Rp. 454.134.431

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.746.151.722

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UNIT KERJA : RSUD BAGAS WARAS
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGEMBANGAN, HUKUM DAN INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO ISTANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **697230**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m²/200 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 188.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 12.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.124.858

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 777.124.858

III. HUTANG Rp. 16.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 761.124.858

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UNIT KERJA : RSUD BAGAS WARAS
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS WIDIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **638906**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.110.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1410 m2/225 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 1384 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/70 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 155.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 28D/SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GEB 15 EAT (CKD) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 20.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 237.472.472****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 117.700.000**

Sub Total **Rp. 3.640.172.472**

III. HUTANG **Rp. 154.175.960**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.485.996.512

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.